

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendirikan monumen tersebut sebagai landmark di kota Makassar, rumah bagi wilayah timur Indonesia. Pembangunan trigger area didahului dengan pembangunan monumen sentral Indonesia, Equilibrium Center Point Park (ECP). Investasi pemerintah dan partisipasi sektor swasta menyumbang 10% dari biaya reklamasi ECP, dengan biaya awal sebesar \$153 miliar. Lokasi seluas 36,5ha, yang akan dikonfirmasi untuk tahap pengembangan awal, akan bertindak sebagai 'pemicu' untuk pengembangan lebih lanjut di kawasan tersebut.

Bertambahnya jumlah penduduk di suatu daerah menimbulkan proses pembangunan yang menunjang aktivitas masyarakat. Pada dasarnya pembangunan adalah suatu proses yang melibatkan seluruh sumber daya yang ada untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Prosesnya dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan permasalahan terkini dan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam. Dengan demikian, pembangunan dapat terlaksana dengan sukses dan kesejahteraan masyarakat dapat terjamin. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal melalui pembangunan fisik adalah Pusat Pembangunan Indonesia (CPI). CPI berencana untuk membangun hotel kelas dunia dengan gedung-gedung tinggi, pusat pemerintahan dan bisnis, resor dan lapangan golf di lahan seluas 600 hektar. Pembangunan Pusat Indonesia Pusat (CPI) akan memberikan dampak positif karena mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan yang pesat, namun juga dapat memberikan dampak negatif. Awalnya, kawasan pengembangan Center Point Indonesia (CPI) dihuni oleh masyarakat marginal yang berdagang dan mencari makan kerang di pesisir pantai Losari.

Hasilnya, Indonesia bergabung dengan kelompok G20 yang terdiri dari 19 kekuatan ekonomi dunia bersama dengan Uni Eropa (UE). Karena jumlah penduduknya yang besar dan kekayaan alamnya, Indonesia merupakan salah satu

negara terbesar di dunia. Indonesia mulai pulih meski mengalami krisis ekonomi. Perkembangan Indonesia saat ini serupa dengan negara-negara lain. Ada beberapa mega proyek yang sangat bagus di Indonesia juga. Beberapa proyek besar telah selesai, antara lain Jembatan Suramadu dan Trans Studio, wahana hiburan dalam ruangan terbesar di dunia. Salah satu proyek berskala besar ini, Center Point Of Indonesia (CPI), akan banyak dibangun di Sulawesi Selatan. CPI akan menyediakan kawasan khusus bagi Makassar yang dapat dijadikan pusat bisnis, pariwisata, dan rekreasi. Pembangunan yang tidak konvensional mau tidak mau menimbulkan banyak permasalahan dan kritik, termasuk anggaran yang besar dan pembebasan lahan yang seringkali menjadi permasalahan besar. Bahkan dalam proses pembangunan, masih banyak pihak yang mengkritisnya, bahkan ada yang menganggapnya sebagai alat politik dan jualan politik untuk pemilihan gubernur yang baru saja dimulai. Jika iya, proyek besar ini perlu diselesaikan atau setidaknya tampak sedang berjalan agar masyarakat tidak melihatnya sebagai sebuah kegagalan. Kajian ini menarik karena menggali pandangan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah di Sulawesi Selatan, wilayah tengah Indonesia. Ini adalah hasil dari proyek bernilai triliunan dolar ini.

Di antara banyak rencana reklamasi pantai di Indonesia, ada beberapa yang membawa manfaat lebih besar bagi masyarakat dibandingkan rencana lainnya. Salah satu contohnya adalah proyek reklamasi di Balai Indonesia Pusat (CPI) di Kota Makassar. Pemerintah negara bagian dan PT Ciputra bekerja sama untuk melaksanakan proyek ini sesuai mandatnya masing-masing. Nyatanya, rencana ini sangat menguntungkan karena akan menjadikan Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan menjadi ikon baru sebagai kota ternama dunia. Namun masyarakat setempat menentang proyek tersebut, terutama para nelayan, karena khawatir mereka akan kehilangan pekerjaan. Proyek Center Point Of Indonesia dijalankan oleh pemerintahan provinsi Sulawesi Selatan dan PT Yasmin Bumi Asri, dengan Ciputra Group. Seperti pusat Indonesia. Ini karena proyek bernilai triliunan dolar ini.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan PT. Hal ini berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) No. 252/VII/PEM PROV/2013 dan No. 231/YBA/VII/2013.

Terkait reklamasi kawasan Indonesia Point Center di Makassar, Yasmin Bumi Asri mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan mendapat lahan reklamasi kurang lebih 50 hektar sebagai bagian dari pengembangan kawasan Indonesia Point Center. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah menandatangani perjanjian kerja sama dengan investor.

Perencanaan tata ruang wilayah mengacu pada penataan tempat dengan dimensi dan isi yang luas, dengan mempertimbangkan struktur dan pola. Rencana tersebut harus mempertimbangkan aspek administratif dan fungsional serta struktur dan pola lokasi berdasarkan sumber daya alam dan buatan yang tersedia. Hal ini membantu mencapai pembangunan berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan. Menurut undang-undang no. 26 Tahun 2007 Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang mencakup seluruh aspek kehidupan diperlukan upaya perencanaan tata ruang dan memberikan masyarakat akses terhadap proses perencanaan. Pembangunan perkotaan berkelanjutan secara umum diartikan sebagai pembangunan perkotaan yang mengutamakan keseimbangan antara faktor ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Hal ini penting untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan tanpa mengurangi peluang generasi mendatang untuk menikmati kondisi yang sama (Novliza dan Eva, 2019).

Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam. Memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa menimbulkan kerugian Keselamatan dan kesehatan generasi mendatang adalah prioritas utama kami. Salah satu konsep kunci pembangunan berkelanjutan adalah meningkatkan kesejahteraan hidup. Hal tersebut menjadi dasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Konsep lain yang diangkat antara lain upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup manusia saat ini dan masa depan, serta upaya meningkatkan jumlah sumber daya alam terbarukan. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam menjadi gagasan tambahan untuk mencegah terjadinya limbah dan kerusakan lingkungan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti dapat merumuskan masalah penelitian ini sebagai “Bagaimana peran badan perencanaan dan pembangunan daerah dalam kebijakan tata ruang dan wilayah di Kota Makassar sebagai titik sentral perspektif pembangunan berkelanjutan di Indonesia?”

## **1.3 Tujuan Studi**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran badan perencanaan dan pembangunan daerah dalam kebijakan penataan ruang dan wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan di titik pusat Indonesia Kota Makassar.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat dilihat baik secara teoritis maupun praktis. Keuntungan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

### **1.4.1 manfaat nyata**

#### **1. Bagi para peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan referensi yang dapat dimanfaatkan dalam program penelitian ilmiah pemerintah. Membantu mengembangkan sumber daya manusia dan meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik.

#### **2. Untuk almamaterku**

Kami berharap hasil penelitian ini dapat membantu meningkatkan program penelitian administrasi Departemen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta mendukung pengembangan talenta.

#### **3. untuk masyarakat**

Ini adalah sumber informasi bagi orang-orang yang secara langsung atau tidak langsung peduli dengan isu-isu yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemerintah di seluruh masyarakat.

### 1.4.2 Keuntungan Teoretis

Hal ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, khususnya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dapat dijadikan rujukan dan sumber pendapat oleh pihak-pihak terkait untuk membantu mendorong kebijakan pemerintah ke depan.

